



Subversi Salib di Papua: Semiotika Kritis Simbol Keagamaan sebagai Instrumen Perlawanan dalam Dokumenter 'Pesta Babi'

Muhammad Fadli Hidayah¹, Muhamad Aldiansyah Saputra², Rifma Ghulam³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Email: muhammadfadlihidayah@gmail.com

Abstract: *The expansion of Indonesia's National Strategic Project (PSN) for food and energy estates in Papua has triggered ecological crises and the dispossession of indigenous customary lands. The documentary Pesta Babi: Colonialism in Our Time (2026) captures symbolic resistance through the subversion of the Red Cross symbol. This study investigates how religious and ecological symbols are transformed into instruments of decolonial struggle and advocacy for living space. Employing a qualitative approach within a critical paradigm, Roland Barthes' semiotic framework (denotation, connotation, myth) is combined with Liberation Theology to uncover the prophetic dimension of the oppressed's resistance. Findings reveal that the Red Cross and the pig entity are redefined from passive objects into epicenters of collective resistance, customary boundary markers (sasi), and spiritual certificates of legitimacy that challenge state legal hegemony. In conclusion, Papuan indigenous communities liberate these symbols from institutional dogma to construct emancipatory counter-myths, where the defense of land and nature is understood as a sacred act of faith against the structural sins of capitalism.*

Keywords: *Critical Semiotics, Pesta Babi Documentary, Red Cross.*

Abstrak: Ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan energi di Papua memicu krisis ekologis dan ancaman perampasan tanah ulayat masyarakat adat. Film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* (2026) merekam perlawanan simbolik melalui subversi makna Salib Merah. Penelitian ini bertujuan membongkar transformasi simbol keagamaan dan ekologis tersebut sebagai instrumen dekolonial dan advokasi ruang hidup. Dengan pendekatan kualitatif berparadigma kritis, analisis semiotika Roland Barthes (denotasi, konotasi, mitos) dipadukan dengan Teologi Pembebasan untuk menyingkap dimensi profetis perlawanan kaum tertindas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Salib Merah dan entitas babi tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan menjadi episentrum perlawanan kolektif, tapal batas sasi adat, serta sertifikat legalitas rohani yang menggugat hegemoni hukum negara. Kesimpulannya, masyarakat adat Papua membebaskan simbol-simbol tersebut dari dogma institusional dan membangun mitos tandingan yang emansipatif, di mana perjuangan menjaga tanah dan alam dipahami sebagai panggilan iman melawan dosa struktural kapitalisme.

Kata kunci: Dokumenter Pesta Babi, Salib Merah, Semiotika Kritis

1. LATAR BELAKANG

Realitas sosial, politik, dan ekologis di Papua dewasa ini terus berada di bawah bayang-bayang ancaman perampasan ruang hidup berskala masif. Kebijakan pembangunan negara yang dibungkus dalam justifikasi Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pengembangan kawasan lumbung pangan energi berupa *food estate* tebu bioetanol dan sawit biodiesel, secara agresif mengekspansi tanah-tanah adat. Praktik ini kerap kali melegitimasi perampasan dengan mengklaim wilayah ulayat sebagai tanah negara atau lahan kosong, yang pada akhirnya meminggirkan keberadaan masyarakat adat secara struktural. Fenomena ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat adat,

negara, dan oligarki korporasi ini pada hakikatnya bermuara pada lahirnya konflik agraria dan krisis keadilan ekologis yang menuntut pembelaan hukum serta pengakuan hak-hak komunal masyarakat atas tanah warisan leluhur mereka (Pratama, Pratiwi, & Lestari 2025).

Di tengah konstelasi penindasan tersebut, perlawanan masyarakat tidak hanya berwujud konfrontasi fisik, melainkan turut bertransformasi ke dalam ekspresi kultural dan spiritual yang terekam kuat melalui media massa. Dalam disiplin ilmu komunikasi, khususnya pada perspektif komunikasi pembangunan, film dokumenter diakui bukan sekadar sebagai produk hiburan visual semata, melainkan berfungsi sebagai instrumen edukasi kultural, media dokumentasi pelanggaran hak asasi, sekaligus medium strategis untuk mengorganisasi kesadaran kolektif masyarakat dalam merespons dinamika pembangunan (Hanief a/ac Rahmawati 2026). Salah satu bentuk kontra-narasi terkuat yang mendokumentasikan jeritan ekologis masyarakat ini terekam secara komprehensif dalam film dokumenter berjudul *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* (2026). Film ini secara spesifik merepresentasikan realitas konflik agraria di Papua tidak hanya melalui dokumentasi kerusakan alam, tetapi juga lewat penyematan makna pada judul dan elemen representasi visualnya yang sarat akan muatan pesan perlawanan (Yulianto a/ac Iskandar 2026).

Lebih dari sekadar rekaman naratif, dokumenter ini memperlihatkan fenomena komunikasi visual yang sangat unik penggunaan simbol Salib Merah raksasa. Salib merah tidak ditampilkan sebagai objek religius yang pasif, melainkan direbut kembali oleh kaum marginal dan diubah menjadi instrumen perlawanan dekolonial, demiliterisasi, serta advokasi ruang hidup. Fenomena pergeseran makna ini menuntut pembacaan yang mendalam dan analitis. Untuk membongkar kompleksitas tersebut, penelitian ini berpijak pada paradigma kritis dengan menggunakan pendekatan Semiotika Roland Barthes sebagai pisau analisis utama. Semiotika Barthes dinilai sangat representatif dalam membedah teks visual melalui sistem signifikasi dua tahap yakni tingkat denotasi dan konotasi untuk kemudian menyingkap mitos atau ideologi dominan yang bekerja secara hegemonik di balik sebuah tanda (Azmi a/ac Wibowo 2025; Shalekhah a/ac Martadi 2020). Pendekatan ini sangat relevan untuk menelusuri bagaimana simbol-simbol visual digunakan sebagai bahasa perlawanan yang otentik terhadap narasi nasionalisme palsu dan kekuatan dominasi negara (Fikri, Yakin, a/ac Yakin 2025).

Guna memberikan landasan eksplanatoris yang lebih tajam dan komprehensif, analisis semiotika dalam penelitian ini diintegrasikan dengan kerangka Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci. Dalam ruang lingkup paradigma kritis, Gramsci menegaskan bahwa kekuasaan kelas dominan tidak semata-mata dipelihara melalui aparatus koersif atau kekerasan fisik negara (*state coercion*), melainkan secara halus ditanamkan melalui hegemoni budaya yang memproduksi kepatuhan sukarela (*consent*) dari kelompok yang ditindas Siswati (2018). Melalui penetapan kebijakan pembangunan seperti PSN, kelas penguasa mengonstruksi "kesadaran semu" di ruang publik guna menormalisasi eksploitasi agraria atas nama modernisasi dan kesejahteraan umum Nadilla dkk. (2025).

Namun, ruang hegemoni ini tidak bersifat statis dan selalu membuka peluang bagi lahirnya resistensi kultural. Kelompok masyarakat adat, yang bertindak sebagai intelektual organik dari basis massa yang terpinggirkan, dapat melakukan perang posisi (*war of position*) di ranah kebudayaan untuk meruntuhkan legitimasi moral kelompok dominan tersebut (Putri, 2022). Dalam konteks krisis ruang hidup di Papua, subversi makna simbol keagamaan seperti Salib Merah merupakan representasi dari upaya membangun blok historis baru yang melahirkan kontra-hegemonie (*counter-hegemony*) guna mendekonstruksi klaim-klaim kebenaran sepihak dari negara dan korporasi (Rupiassa, Lattu, dan Therik 2024). kerangka Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci. Dalam ruang lingkup paradigma kritis, Gramsci menegaskan bahwa kekuasaan kelas dominan tidak semata-mata dipelihara melalui aparatus koersif atau kekerasan fisik negara (*state coercion*), melainkan secara halus ditanamkan melalui hegemoni budaya yang memproduksi kepatuhan sukarela (*consent*) dari kelompok yang ditindas (Syam, 2020). Melalui penetapan kebijakan pembangunan seperti PSN, kelas penguasa mengonstruksi "kesadaran semu" di ruang publik guna menormalisasi eksploitasi agraria atas nama modernisasi dan kesejahteraan umum (Hidayat, 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang mengintegrasikan semiotika Roland Barthes dan Teori Hegemoni Antonio Gramsci untuk membedah relasi kuasa dalam karya. Secara teoretis, karya seni dianggap sebagai medan tempur ideologis yang mencerminkan pertarungan kepentingan di masyarakat.

A. Semiotika sebagai Pembongkar Mitos

Pendekatan semiotika digunakan untuk membongkar "mitos" pesan ideologis yang dinormalisasi menjadi kebenaran alamiah yang sering kali menutupi kepentingan kelompok dominan. Melalui pembedahan tanda, kajian ini mengungkap bagaimana ideologi politik dan status sosial dikonstruksi di balik wujud estetika karya.

B. Hegemoni dan Konsensus

Teori hegemoni Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya ditegakkan melalui koersi (*political society*), melainkan melalui konsensus ideologis di ranah *civil society*. Hegemoni merupakan bentuk kepemimpinan politik di mana kelompok subordinat menerima nilai-nilai penguasa secara sukarela. Studi sosiologi sastra menunjukkan bahwa hegemoni beroperasi secara dinamis melalui agen-agen sosial seperti pendidikan, agama, dan norma keluarga, sehingga posisi penguasa dan yang dikuasai dapat terus dinegosiasikan.

C. Kontra-Hegemoni dan Intelektual Organik

Untuk melawan dominasi ini, kelompok subordinat menjalankan *war of position* (perang posisi), yakni upaya jangka panjang membangun kekuatan tandingan melalui *civil society*. Dalam proses ini, peran intelektual organik yakni organisator yang sadar akan identitas dan posisinya menjadi vital untuk merumuskan kontra-hegemoni. Kelompok ini bertugas membangun blok historis (*historic bloc*), yakni aliansi kekuatan sosial yang menyatukan visi moral-intelektual baru bagi masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan bersandar sepenuhnya pada paradigma kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menafsirkan makna terdalam di balik tanda-tanda visual serta kultural, bukan untuk mengukur data secara numerik. Desain penelitian yang diterapkan adalah analisis teks media, secara spesifik menggunakan instrumen Semiotika kritis dari Roland Barthes. Paradigma kritis difungsikan sebagai landasan filosofis karena penelitian ini memandang teks media dalam hal ini film dokumenter bukan sekadar medium dokumentasi yang netral, melainkan beroperasi sebagai arena pertarungan ideologi, sarana pelestarian hegemoni penguasa, sekaligus

ruang artikulasi perlawanan bagi kelompok masyarakat adat yang termarginalkan oleh kebijakan struktural.

Dari total populasi adegan, peneliti secara sengaja (purposive) menetapkan 6 unit pengamatan berupa tangkapan layar (screenshot) sebagai sampel analisis utama. Penetapan 6 unit pengamatan ini didasarkan pada prinsip saturasi data (kejenuhan data) dan representasi tipologis. Keenam unit yang dipilih ini dinilai telah mewakili seluruh fase krusial dalam siklus perlawanan simbolik masyarakat adat, yang terbagi ke dalam 3 tipologi utama: (1) Fase persiapan dan konstruksi fisik salib, (2) Fase penancapan dan sakralisasi ruang ekologis di hutan adat, serta (3) Fase artikulasi politik dan advokasi hukum di ruang publik/nasional.

Peneliti membatasi pada 6 unit pengamatan ini karena adegan-adegan Salib Merah lainnya di dalam film merupakan repetisi visual (pengulangan) yang secara semiotis memiliki makna denotatif dan konotatif yang serupa. Dengan demikian, 6 unit pengamatan ini dipandang sudah sangat jenuh (saturated), paling kaya akan variasi tanda, dan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam tanpa menimbulkan redundansi data."

Teknik pengumpulan data utama yang diandalkan dalam studi ini adalah dokumentasi dan observasi tekstual yang mendalam. Data primer dikumpulkan dengan cara membongkar elemen visual, penempatan komposisi, dan relasi antar-tanda dari ketujuh tangkapan layar film dokumenter tersebut. Untuk mendukung ketajaman argumen, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung yang relevan dengan kajian semiotika, ekologi politik, serta Teori Hegemoni Antonio Gramsci.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* (2026) tidak sekadar hadir sebagai rekaman visual atas realitas konflik agraria di Papua, melainkan beroperasi sebagai teks kontra-hegemonik yang secara aktif mendekonstruksi narasi pembangunanisme negara. Dalam bingkai Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa kawasan lumbung pangan energi (bioetanol dan biodiesel), ruang hidup masyarakat adat sering kali direduksi menjadi sebatas "tanah kosong" yang siap dieksploitasi oleh kekuatan oligarki. Melalui analisis semiotika Roland Barthes, penelitian ini membongkar

sistem signifikasi (penandaan) dua tahap denotasi dan konotasi yang bermuara pada penyingkapan mitos. Dalam menginterpretasi mitos tersebut, kerangka Teologi Pembebasan digunakan untuk melihat bagaimana simbol-simbol kultural dan keagamaan ditransformasi dari entitas pasif menjadi instrumen praksis perlawanan dekolonial dan demiliterisasi.

A. Konstruksi Fisik Salib Merah dari Kayu Besi:



Gambar 1. Warga suku Auyu menggotong kayu sepanjang 17 meter untuk dijadikan salib.

1. **Analisis Denotasi (Signifikasi Tingkat Pertama)** Pada tataran signifikasi pertama, gambar ini secara objektif menampilkan aktivitas kolektif (gotong-royong) oleh sejumlah pria masyarakat adat Suku Auyu di dalam kawasan hutan atau rawa. Fokus utama visual adalah sebatang kayu berukuran masif dengan panjang mencapai 17 meter yang diidentifikasi secara naratif sebagai kayu besi rawa, yaitu jenis kayu endemik lokal. Kamera menangkap detail tekstur kayu yang sedang digotong oleh kelompok tersebut sebagai material utama untuk konstruksi salib
2. **Analisis Konotasi Memasuki tataran konotasi,** Penggunaan kayu besi jenis kayu yang terkenal paling kuat, antipelapukan, dan tidak mudah patah di tanah Papua mengonotasikan karakter perlawanan masyarakat adat itu sendiri. Ini adalah simbol keteguhan iman, ketahanan fisik, dan keaslian (*indigeneity*) yang berakar pada tanah leluhur. Perlawanan mereka terhadap PSN bukan aksi momentum yang rapuh, melainkan perjuangan jangka panjang yang kokoh. Pada tataran konotasi, aktivitas "menggotong kayu" ini tidak lagi dimaknai sebagai kegiatan pemindahan material bangunan, melainkan sebagai manifestasi dari **solidaritas organik**. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, keterlibatan massa dalam satu tugas fisik yang berat

mengonotasikan pengorganisasian komunitas yang kuat (*community organizing*) sebagai respons atas ancaman ekologis terhadap ruang hidup mereka (Hanief a/ac Rahmawati 2026). Aksi komunal ini mengonotasikan reposisi peran masyarakat; dari yang semula diposisikan sebagai pihak pasif dalam kebijakan pembangunan negara, kini berubah menjadi aktor kolektif yang aktif melakukan kontrol teritorial. Kayu tersebut, dalam konteks ini, berperan sebagai "penanda batas" yang sedang dipersiapkan oleh masyarakat, menunjukkan bahwa mereka sedang mengambil alih kendali atas hak penguasaan tanah ulayat melalui kerja kolektif yang terstruktur (Pratama, Pratiwi, a/ac Lestari 2025).

3. **Analisis Mitos (Signifikasi Tingkat Ketiga).** Pada tingkat signifikasi ketiga, bekerjanya mitos menjadi jelas melalui pertarungan narasi antara negara dan masyarakat adat. Negara, melalui instrumen PSN, mengonstruksi mitos bahwa wilayah Papua adalah "lahan kosong" atau "tanah negara" yang tidak terkelola, sehingga melegitimasi eksploitasi oleh korporasi (Fikri, Yakin, a/ac Yakin 2025). Visualisasi Gambar 1 meruntuhkan mitos tersebut melalui perlawanan wacana. Dengan menampilkan warga yang bekerja keras membentuk material salib mereka sendiri, mereka secara tidak langsung memproduksi mitos tandingan: bahwa tanah tersebut memiliki pemilik yang sah secara historis dan memiliki manajemen komunitas yang solid. Adegan ini menyingkap realitas bahwa masyarakat adat sedang melakukan klaim ruang hidup secara fisik dan simbolik. Kerja kolektif yang terekam bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan langkah awal dari perlawanan kultural untuk menolak klaim hegemonik negara yang menganggap wilayah tersebut sebagai entitas tanpa pemilik (Yulianto a/ac Iskandar 2026).

B. Salib Merah: Sasi Adat, Episentrum.



Gambar 2. Masyarakat adat bergotong royong menarik tali untuk mendirikan Salib Merah raksasa

1. ***Analisis Denotasi (Signifikasi Tingkat Pertama)***, Pada tataran signifikasi pertama, makna dibangun murni dari entitas yang secara harfiah dan objektif terekam oleh lensa kamera. Secara denotatif, teks visual ini menampilkan sebuah aktivitas kolektif di mana sekelompok warga Suku Auyu yang mengenakan atribut pakaian adat tengah bergotong royong. Fokus utama dari adegan tersebut adalah tindakan fisik berupa penarikan seutas tali dari arah bawah ke atas secara bersama-sama. Tali tersebut terikat pada sebuah struktur kayu berukuran raksasa yang dibentuk menyilang layaknya salib, di mana seluruh permukaannya telah dicat dengan warna merah. Pada tahap awal ini, gambar hanya mempresentasikan realitas fisik tanpa asumsi: sekelompok manusia yang menguras tenaga untuk mendirikan sebuah objek kayu berwarna merah di alam terbuka.
2. ***Analisis Konotasi (Signifikasi Tingkat Kedua)***, Makna denotatif tersebut kemudian bergeser pada tataran signifikasi kedua (konotasi), di mana tanda fisik dihubungkan dengan kode-kode kultural masyarakat lokal dan situasi struktural yang mengancam mereka. Prosesi komunal ini tidak dikonotasikan sebagai kelaziman dari ritual peribadatan gerejawi konvensional. Sebaliknya, elemen gotong royong dengan atribut adat tersebut bertransformasi menjadi simbol solidaritas dan kebangkitan kolektif dalam merespons ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat adat, negara, dan oligarki korporasi (Pratama, Pratiwi, a/ac Lestari 2025).
3. ***Analisis Mitos (Signifikasi Tingkat Ketiga dan Orientasi Perlawanan Wacana)***. Rantai pemaknaan dari denotasi dan konotasi tersebut bermuara pada tingkat signifikasi ketiga, yakni pembongkaran dan penciptaan mitos. Dalam kelaziman tatanan sosial, terdapat sebuah mitos atau ideologi dominan

yang bekerja secara hegemonik untuk mengurung fungsi salib sekadar pada makna kesalehan pasif, yang hanya berdiam di dalam tembok-tembok gereja (Shalekhah a/ac Martadi 2020). Melalui adegan pendirian Salib Merah ini, masyarakat adat secara radikal mendekonstruksi mitos kesalehan pasif tersebut. Mereka memproduksi mitos tandingan (*counter-myth*), di mana kelompok marginal merebut kembali simbol keagamaan dan menjadikannya sebagai instrumen otentik perlawanan terhadap narasi pembangunan sepihak dan dominasi negara (Azmi a/ac Wibowo 2025; Fikri, Yakin, a/ac Yakin 2025). Pemaknaan simbolik pada tahap mitos ini menyingkap realitas bahwa perlawanan tidak sekadar bersifat fisik, melainkan merupakan perang posisi di ranah kebudayaan. Tindakan menyematkan makna advokasi ekologis pada simbol agama adalah upaya untuk melawan narasi "kesadaran semu" yang selama ini direproduksi oleh kelas penguasa untuk menormalisasi eksploitasi alam (Hidayat, 2021). Pembongkaran mitos ini beroperasi sebagai fondasi awal untuk meruntuhkan legitimasi moral dari kekuatan dominan, sebuah upaya sistematis masyarakat adat yang secara teoritis menjadi prakondisi bagi lahirnya perlawanan kontra-hegemoni di ruang publik.

C. Episentrum Ruang Perlawanan



Gambar 3. Tangkapan udara lanskap konsentrasi massa di sekitar Salib Merah dan tenda darurat

1. **Analisis Denotasi (Signifikasi Tingkat Pertama)** Pada tataran denotatif, gambar ini menyajikan data visual yang tampak secara objektif melalui lensa kamera udara. Visual tersebut menampilkan sebuah hamparan lahan terbuka dengan tanah yang berwarna kecokelatan di tengah vegetasi hijau. Di titik presisi bagian tengah, berdiri tegak sebuah objek berbentuk salib berwarna merah. Di sisi samping salib, terdapat tenda darurat berwarna hijau yang terpasang di atas permukaan tanah. Di sekitar kedua objek tersebut, terlihat

sebaran massa yang terdiri dari puluhan individu yang sedang berkerumun, membentuk pola pemukiman atau perkemahan sementara di area tersebut.

2. **Analisis Konotasi (Signifikasi Tingkat Kedua)** Pada tingkat konotasi, elemen-elemen visual di atas merepresentasikan pengambilalihan ruang yang sarat akan makna politis. Hamparan lahan tersebut tidak lagi dipandang sebagai lahan terbuka biasa, melainkan dikonotasikan sebagai wilayah teritorial yang sedang diklaim kembali (*reclaimed*) oleh masyarakat adat sebagai wilayah berdaulat. Salib Merah yang berdiri tegak diposisikan sebagai episentrum sakral yang memancarkan daya pertahanan dan otoritas kultural. Sementara itu, tenda hijau tidak hanya bermakna sebagai tempat berlindung, melainkan sebagai simbol okupasi fisik tanda bahwa masyarakat adat secara gigih berjaga siang dan malam untuk menjaga tanah mereka dari intervensi luar. Konotasi ini mempertegas bahwa keberadaan mereka di sana adalah bentuk pendudukan yang terorganisir untuk memproteksi ruang hidup mereka (Pratama, Pratiwi, a/ac Lestari 2025).
3. **Analisis Mitos (Signifikasi Tingkat Ketiga dan Orientasi Perlawanan Wacana)** Pada tahap mitos, visualisasi ini beroperasi secara ideologis untuk mendekonstruksi klaim-klaim yang diproduksi oleh rezim pembangunanisme. Secara nasional, terdapat mitos hegemonik yang diproduksi oleh negara melalui kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pelabelan lahan masyarakat adat sebagai "tanah negara" atau "tanah kosong" yang sah untuk dieksploitasi berdasarkan peta konsesi HGU yang diterbitkan secara sepihak (Fikri, Yakin, a/ac Yakin 2025). Mitos yang dibangun melalui Gambar 3 adalah sebuah kontra-narasi yang menantang klaim hukum formal tersebut dengan menyajikan "legalitas" berbasis okupasi fisik dan kehadiran rakyat. Dengan menempatkan salib sebagai pusat dari tenda-tenda pertahanan, masyarakat adat membangun narasi bahwa tanah tersebut bukanlah objek komoditas yang "kosong", melainkan altar kehidupan yang memiliki pemilik sah secara historis. Pembongkaran mitos ini menunjukkan bahwa masyarakat adat sedang melakukan perlawanan di medan simbolik untuk mendelegitimasi narasi "tanah kosong" negara. Ini merupakan strategi untuk meruntuhkan kesadaran semu yang selama ini digunakan untuk memobilisasi konsensus

publik bahwa pembangunan skala besar adalah satu-satunya jalan menuju kesejahteraan (Hidayat, 2021). Dengan memposisikan diri secara fisik di atas lahan yang diklaim negara sebagai tanah konsesi, masyarakat adat sedang melakukan *war of position* atau perang posisi mengambil alih ruang fisik dan ruang wacana guna meruntuhkan klaim kebenaran sepihak dari korporasi dan negara.

D. Salib sebagai Batas Sasi Sungai



Gambar 4. Salib Merah yang berdiri tegak sebagai batas terdepan di pinggiran bibir sungai.

1. **Analisis Denotasi (Signifikasi Tingkat Pertama)** Secara visual, Gambar 4 memperlihatkan lanskap sungai dengan tepian yang ditumbuhi vegetasi lebat. Di titik paling depan bibir sungai, berdiri tegak struktur Salib Merah raksasa yang tampak mencolok di antara warna hijau hutan. Di sekitar area tersebut, terlihat beberapa perahu kayu tradisional milik warga yang terparkir atau bersandar di pinggiran perairan. Secara objektif, gambar ini merekam penempatan objek buatan manusia (salib) pada ruang transisi antara daratan (hutan ulayat) dan perairan (sungai).
2. **Analisis Konotasi (Signifikasi Tingkat Kedua)** Penempatan salib di pinggir sungai membawa makna asosiatif yang krusial dalam perlawanan agraria. Sungai di Papua dipahami sebagai urat nadi peradaban dan sumber penghidupan yang sakral bagi masyarakat adat. Pemasangan salib di titik ini mengonotasikan "portal" atau tapal batas (*frontier*) yang memisahkan wilayah yang boleh diakses dan wilayah yang dilarang bagi pihak luar. Secara antropologis, masyarakat adat di Maluku dan Papua mempraktikkan *Sasi* sebagai sistem pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal yang bersifat sakral (Sunarto et al. 2026). Secara konotatif, Salib Merah di sini

bertransformasi menjadi *Sasi* sungai, yakni aturan adat yang berfungsi sebagai larangan keras bagi pihak luar untuk melakukan eksploitasi atau pencemaran di sekitar sumber daya tersebut (Wutwensa et al. 2024). Pemasangan di bibir sungai adalah bentuk "hukuman" atau peringatan visual bahwa wilayah perairan tersebut berada di bawah perlindungan hukum adat, sehingga segala bentuk intrusi industri dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan ruang hidup masyarakat lokal.

3. **Analisis Mitos (Signifikasi Tingkat Ketiga dan Orientasi Perlawanan Wacana)** Pada tingkat mitos, tindakan menancapkan "palang rohani" di pinggir sungai secara radikal mendekonstruksi mitos birokrasi negara yang memaksakan batas wilayah secara administratif atau melalui peta konsesi sepihak (Pratama, Pratiwi, a/ac Lestari 2025). Mitos dominan negara hendak menormalisasi bahwa lahan yang tidak memiliki sertifikat hukum formal adalah lahan "kosong" yang bebas dikuasai. Masyarakat adat melawan mitos ini dengan "legalitas rohani" melalui simbol *Sasi*. Menurut (Wutwensa et al. 2024), *Sasi* bukan sekadar tradisi, melainkan instrumen untuk menegaskan kedaulatan ruang dan keberlangsungan relasi manusia dengan alam. Dengan demikian, pemasangan salib ini bukan sekadar tindakan religius, melainkan langkah politis untuk menggugat hegemoni definisi negara mengenai "ruang hidup". Ini adalah bentuk perlawanan simbolik yang menantang "kebenaran" pemerintah, sekaligus mengarahkan pemahaman bahwa masyarakat adat sedang membangun kekuatan kontra-hegemoni dengan menggunakan instrumen kebudayaan sebagai alat legitimasi politik.

E. Legitimasi Doktrinal dan Legalitas Rohani: Menggugat Hegemoni Negara



Gambar 5. Salib Merah yang diapit oleh baliho Yesus dan Paus Fransiskus

1. **Analisis Denotasi (Signifikasi Tingkat Pertama)** Secara denotatif, gambar ini merekam instalasi simbolis di ruang terbuka. Di titik tengah, berdiri tegak sebuah Salib Merah. Pada sisi kiri, terdapat *standee* bergambar sosok Yesus dengan tulisan "Yesus Uram Tobo", sementara pada sisi kanan terpampang baliho Paus Fransiskus dengan teks "ENSIKLIK LAUDATO SI' - TENTANG PERAWATAN RUMAH KITA BERSAMA". Di sekitar objek tersebut, terekam aktivitas sekelompok warga dalam proses pengorganisasian. Secara fisik, ini adalah perpaduan simbol keagamaan lokal dan otoritas gerejawi global dalam satu bingkai visual.
2. **Analisis Konotasi (Signifikasi Tingkat Kedua)** Pada tataran konotasi, penempatan simbol lintas kultural ini merupakan manuver politik-spiritual yang strategis. Dengan menghadirkan sosok Yesus dan Paus Fransiskus, masyarakat adat sedang melakukan tindakan "penyandaran" atas perjuangan agraria mereka kepada otoritas moral global. Penggunaan *Ensiklik Laudato Si'* dokumen kepausan yang membahas kewajiban merawat bumi mengonotasikan bahwa perjuangan masyarakat Papua bukan lagi sekadar konflik lokal yang terisolasi, melainkan bagian dari agenda universal untuk menjaga kelestarian ekosistem (Purba a/ac Huka 2024). Secara konotatif, masyarakat adat menggeser posisi tawar mereka; mereka memposisikan perjuangan tanah ulayat sebagai perwujudan ajaran untuk menjaga "Rumah Kita Bersama" guna meraih perlindungan dari komunitas internasional (Gumelar a/ac Wijaya 2019).
3. **Analisis Mitos (Signifikasi Tingkat Ketiga)** Pada tingkat mitos, visualisasi ini mendekonstruksi narasi hegemonik negara yang memposisikan konflik agraria sebagai masalah administratif yang harus tunduk pada hukum positif negara, seperti penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau keputusan pelepasan kawasan hutan (Pratama, Pratiwi, a/ac Lestari 2025). Negara membangun mitos bahwa setiap penentangan terhadap kebijakan pembangunan adalah tindakan melawan "kebenaran" hukum formal. Gambar 7, masyarakat adat meruntuhkan mitos tersebut dengan menghadirkan otoritas moral yang lebih tinggi. Mereka membangun mitos tandingan bahwa perintah

menjaga ciptaan Tuhan jauh lebih luhur daripada dokumen administratif yang melegitimasi perampasan tanah oleh korporasi (Purba a/ac Huka 2024). Langkah ini merefleksikan transformasi simbol keagamaan dari objek pasif menjadi alat advokasi yang emansipatif, di mana perjuangan mempertahankan kelestarian alam adalah wujud panggilan iman terhadap dosa struktural (Yulianto a/ac Iskandar 2026).

F. Proklamasi Tertulis di Atas Salib



Gambar 6. Proses pelukisan pesan klaim kepemilikan tanah adat di atas kayu salib

1. **Analisis Denotasi (Signifikasi Tingkat Pertama)** Secara denotatif, gambar ini merekam tindakan spesifik seorang individu yang sedang berinteraksi dengan sebuah objek kayu berwarna merah. Puncak dari subversi simbolik ini terekam dengan sangat dramatis pada adegan yang memperlihatkan tangan seorang warga Papua secara perlahan mengecat huruf putih bertuliskan "TANAH MILIK SOMU" di atas batang kayu besi rawa berwarna merah. Pada tingkat pemaknaan konotatif, tindakan melukis nama leluhur atau marga di atas salib ini secara langsung mengubah ontologi benda tersebut. Salib tidak lagi dibiarkan sebagai objek peribadatan yang bisu atau pasif, melainkan berevolusi wujud menjadi dokumen proklamasi yang tertulis secara eksplisit. Kayu salib raksasa tersebut dialihfungsikan sebagai "sertifikat" kepemilikan adat yang absolut dan tidak dapat dibantah (Shalekhah a/ac Martadi 2020). Dalam arena konflik agraria, negara hampir selalu berlindung di balik mitos legalitas hukum positif, seperti penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Surat Keputusan pelepasan kawasan hutan dari kementerian yang diterbitkan tanpa persetujuan warga (Pratama, Pratiwi, a/ac Lestari 2025).

2. **Analisis Konotasi (Signifikasi Tingkat Kedua)** Pada tataran konotasi, tindakan melukis nama leluhur atau marga (Somu Sob) di atas salib ini secara langsung mengubah ontologi atau hakikat benda tersebut. Salib tidak lagi dibiarkan sebagai objek peribadatan yang bisu atau pasif, melainkan berevolusi wujud menjadi dokumen proklamasi yang tertulis secara eksplisit. Kayu salib raksasa tersebut kini dialihfungsikan sebagai "sertifikat" kepemilikan adat yang absolut dan tidak dapat dibantah oleh pihak luar. Tulisan putih di atas permukaan merah yang kontras mengonotasikan penegasan identitas dan kepemilikan yang permanen. Tindakan ini merupakan simbol perlawanan terhadap upaya penghapusan sejarah dan keberadaan masyarakat adat yang sering kali dilakukan melalui klaim administratif yang tidak mengakui hak-hak komunal mereka (Shalekhah a/ac Martadi 2020).
3. **Analisis Mitos (Signifikasi Tingkat Ketiga)** Pada tingkat mitos, adegan ini berfungsi sebagai antitesis terhadap mitos legalitas hukum positif negara. Dalam sengketa agraria, negara hampir selalu berlindung di balik mitos legalitas formal, seperti penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau keputusan pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan tanpa persetujuan warga (Pratama, Pratiwi, a/ac Lestari 2025). Mitos yang coba diruntuhkan oleh masyarakat adat adalah bahwa "legalitas" hanya diakui jika tertulis dalam dokumen birokrasi negara. Melalui coretan cat putih di atas salib tersebut, masyarakat Papua membalas hegemoni hukum formal negara dengan menyajikan bentuk "legalitas rohani dan historis" yang jauh lebih luhur. Klaim yang dibangun menjadi sangat fundamental: tanah adat adalah anugerah langsung dari Tuhan yang diwariskan secara turun-temurun kepada leluhur mereka, sehingga pemerintah sekuler tidak memiliki otoritas teologis maupun historis apa pun untuk merampasnya (Azmi a/ac Wibowo 2025; Fikri, Yakin, a/ac Yakin 2025).

Dalam kerangka ini, tulisan di atas salib bertransformasi menjadi surat dakwaan sosial secara langsung kepada negara yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Adegan ini mengukuhkan mitos tandingan bahwa perjuangan mempertahankan tanah ulayat dan menjaga keutuhan ekosistem

bukanlah tindakan makar, melainkan panggilan suci untuk melawan dosa struktural kapitalisme (Yulianto a/ac Iskandar 2026). Simbol keagamaan dan identitas kultural telah dirajut menjadi sertifikat kehidupan absolut yang menggugat kolonialisme gaya baru di tanah Papua.

1) Sintesis: Subversi Simbolik, Hegemoni, dan Perang Posisi dalam Diskursus Kekuasaan.

Analisis semiotika terhadap dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* menggunakan sistem signifikasi Roland Barthes dari denotasi, konotasi, hingga mitos bukanlah sekadar bedah visual, melainkan pintu masuk untuk membongkar diskursus kekuasaan yang bekerja secara laten. Melalui pembacaan tanda tersebut, kita dapat melihat bagaimana "mitos" yang dibangun oleh negara (misalnya mitos tentang lahan kosong atau pembangunanisme) sebenarnya berfungsi sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Untuk memahami bagaimana kekuasaan ini bekerja secara lebih dalam, kita harus merujuk pada Teori Hegemoni Antonio Gramsci. Kekuasaan sejati tidak hanya ditegakkan melalui koersi (pemaksaan fisik) oleh *political society* (negara dan aparatusnya), melainkan melalui konsensus ideologis di ranah *civil society* (masyarakat sipil). Hegemoni merupakan bentuk kepemimpinan politik dan ideologis di mana kelas yang didominasi menerima tatanan nilai kelas penguasa sebagai suatu "kewajaran" atau kesepakatan sukarela.

Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi sosiologi sastra terhadap novel *Koplak* karya Oka Rusmini, di mana hegemoni kekuasaan beroperasi melalui persuasi, pendidikan, agama, dan norma sosial yang membujuk individu untuk tunduk (Diki Febrianto 2020). Dalam novel tersebut, kelompok yang menduduki jabatan pemerintahan pun tidak selalu menjadi pihak yang mendominasi; mereka sering kali didominasi oleh nilai-nilai baru atau intelektualitas dari kelompok di bawahnya, seperti peran anak Koplak yang mendominasi pola pikir ayahnya melalui pengetahuan modern. Proses ini menunjukkan bahwa kekuasaan adalah hubungan yang dinamis, bukan statis. Dalam konteks perlawanan, baik dalam dokumenter maupun narasi sastra, subjek yang terdominasi mulai terlibat dalam strategi Perang Posisi (*War of Position*) (Siswati 2018). Ini adalah strategi jangka panjang untuk melemahkan posisi kelas penguasa dengan membangun kekuatan

tandingan di wilayah *civil society*. Masyarakat adat, yang memosisikan diri sebagai intelektual organik yakni kelompok yang berfungsi sebagai organisator dalam lapisan masyarakat untuk membangun kesadaran baru tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan. Mereka melakukan perlawanan dengan cara meruntuhkan legitimasi moral penguasa.

Tindakan masyarakat adat dalam mendekonstruksi simbol (seperti Salib Merah menjadi *Sasi* atau sertifikat kepemilikan adat) adalah bentuk konkret dari kontra-hegemoni. Dengan mentransformasi kesadaran kolektif mengubah cara masyarakat memandang ruang hidup, agama, dan posisi politik mereka sedang mengikis fondasi moral kekuasaan. Strategi ini merupakan upaya pembentukan blok historis (*historic bloc*) baru, di mana kepentingan lokal diartikulasikan ke dalam perjuangan yang lebih luas dan etis. Dengan demikian, rangkaian subversi simbolik dalam dokumenter *Pesta Babi* dan kritik sosial dalam *Koplak* menegaskan bahwa perjuangan melawan hegemoni adalah perjuangan untuk memenangkan kepemimpinan intelektual dan moral di ruang publik (Amaliyah 2019). Masyarakat membuktikan bahwa mereka mampu menciptakan "mitos tandingan" yang emansipatif untuk menantang dominasi, yang pada akhirnya membuktikan bahwa kekuasaan tidak bersifat absolut selama masyarakat masih memiliki kesadaran kritis untuk mempertanyakannya.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara analisis semiotika Roland Barthes dan Teori Hegemoni Antonio Gramsci memberikan kerangka teoretis yang komprehensif dalam membedah relasi kuasa. Melalui pendekatan semiotika, kita mampu membongkar "mitos" yang selama ini digunakan sebagai alat dominasi baik dalam narasi pembangunanisme negara di Papua maupun dalam struktur sosial pedesaan di Bali untuk melihat makna di balik tanda-tanda yang tampak. Sementara itu, Teori Hegemoni menjelaskan bahwa kekuasaan tersebut tidak dipertahankan melalui koersi atau kekerasan fisik semata, melainkan melalui konsensus ideologis yang dibangun secara halus di ranah *civil society*. Analisis terhadap novel *Koplak* karya Oka Rusmini menegaskan bahwa dominasi kekuasaan beroperasi melalui supremasi kepemimpinan intelektual dan moral, di mana pendidikan, agama, dan norma sosial menjadi perangkat untuk membujuk

masyarakat agar tunduk secara sukarela. Fenomena dalam *Koplak* menunjukkan bahwa kekuasaan bersifat dinamis; posisi dominan dan didominasi dapat saling bertukar melalui proses intelektualisasi, seperti yang tercermin dalam interaksi antar-tokoh. Hal ini membuktikan bahwa hegemoni adalah organisasi konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi yang dinormalisasi.

Di sisi lain, perlawanan masyarakat adat dalam dokumenter *Pesta Babi* memperlihatkan bentuk nyata dari kontra-hegemoni. Mereka tidak lagi memosisikan diri sebagai objek pasif dari sejarah, melainkan bertransformasi menjadi intelektual organik yakni kelompok yang berperan sebagai organisator dalam lapisan masyarakat untuk membangun tatanan nilai baru. Dengan mendekonstruksi makna simbol-simbol (seperti transformasi salib menjadi Sasi), mereka berhasil menciptakan mitos tandingan yang emansipatif dan meruntuhkan legitimasi moral penguasa yang selama ini menopang dominasi.

Secara kolektif, perlawanan yang terekam dalam kedua karya ini menegaskan bahwa perjuangan melawan hegemoni adalah perang posisi (*war of position*) yang menuntut pergeseran kesadaran secara mendalam. Keberhasilan perjuangan ini sangat bergantung pada kemampuan kelompok subordinat untuk menjadi intelektual organik bagi dirinya sendiri, mengubah pola pikir kolektif, dan merumuskan blok historis (*historic bloc*) yang menyatukan kepentingan kelompok untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil. Dengan demikian, sastra dan media dokumenter terbukti bukan sekadar refleksi zaman, melainkan medan tempur ideologis yang krusial bagi kelompok marginal untuk merebut kedaulatan atas ruang hidup dan masa depan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan artikel ini, khususnya kepada para pegiat dokumenter yang terus menyuarakan keadilan ekologis dan ruang hidup masyarakat adat di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Amaliyah, Nabilah. 2019. 'Kekuasaan Dalam Novel Sepohon Kayu di Tengah Gurun Karya Harry D Mohan (Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)'. *Bapala* 5(2): 1–9.
- Azmi, Mohammad Ardy Noor, a/ac Arif Ardy Wibowo. 2025. 'Representasi Konflik Ekonomi dalam Film Agak Laen: Analisis Semiotika Roland Barthes'. *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi* 11(2): 338–56. doi:10.32509/dinamika.v11i2.5976.
- Diki Febrianto, Candra Rahma Wijaya Putra. 2020. 'HEGEMONI KEKUASAAN DALAM NOVEL KOPLAK KARYA OKA RUSMINI: KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA of literature 204 | Jurnal Kredo KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan Direktorat Kementerian Riset , Teknologi dan Pendidikan'. *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra* 3(2).
- Fikri, Mohammad, Fajar Ainol Yakin, a/ac Muhammad Yakin. 2025. 'Bendera Bajak Laut di Negara Bajakan : Semiotika Perlawanan terhadap Nasionalisme Palsu dan Kekuatan Rakyat Sekolah Tinggi IlmuSyariah Nurul Qarnain , Indonesia Bulan Agustus di Indonesia secara historis diposisikan sebagai ruang simbolik dianggap remeh s'. 3.
- Gumelar, Fajar, a/ac Hengki Wijaya. 2019. 'Peran Gereja Masa Kini Menyikapi Teologi Pembebasan Guti  rrez'. *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2(1): 14–26. doi:10.34307/b.v2i1.69.
- Hanief, Lalita, a/ac Yulia Rahmawati. 2026. 'PERAN FILM DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN BUDAYA , PERSPEKTIF : KOMUNIKASI PEMBANGUNAN THE ROLE OF FILM AND SOCIAL MEDIA IN CULTURAL DEVELOPMENT , PERSPECTIVE : DEVELOPMENT COMMUNICATION'. 12(April): 59–68.
- Pratama, Dimas Maulana, Desy Pratiwi, a/ac Nabilla Oktavia Lestari. 2025. 'Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat'. *Indonesian Journal of Law and Justice* 3(2): 10. doi:10.47134/ijlj.v3i2.5248.
- Purba, Fredi Ardo, a/ac Elsami Castigliani Huka. 2024. 'Di Bawah Bayang-bayang TPL: Ekologi Pembebasan Untuk Memulihkan Kawasan Danau Toba'. *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 14(1): 1–20. doi:10.46495/sdjt.v14i1.273.
- Shalekhah, A'yun, a/ac Martadi. 2020. 'Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Poster Film Parasite Versi Negara Inggris'. *Deiksis* 2(03): 54–66. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/>.
- Siswati, Endah. 2018. 'Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci'. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 5(1): 11–33. doi:10.35457/translitera.v5i1.355.
- Sunarto, Erna Eriani, Yogi Ariyanto, Abdillah Rakhman, a/ac Amelia Rizkawani. 2026. 'Budaya Sasi Suku Buton: Tradisi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan sumber daya alam . (Hasanuddin , 2017) dalam penelitiannya tentang peran Sasi dalam pelestarian ekosistem terumbu karang . (Sutanto & Ramli , 2019) mengkaji Sasi sebagai model konservasi'. 4(5): 270–77.
- Wutwensa, Bruri Marwano, Muslim Lobubun, Dominikus Rato, a/ac Bayu Dwi Anggono. 2024. 'A Hybrid Model for Resolving Customary Land Disputes in Papua's Indigenous Communities'. *Jihk* 6(2): 1–12. doi:10.46924/jihk.v6i2.231.
- Yulianto, Hermawan, a/ac Hasan Mukti Iskandar. 2026. 'Analisis Semiotik Makna Judul dan Representasi Konflik dalam Film Dokumenter Pesta Babi'. 4(April).

